BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional sering didefinisikan sebagai aktivitas manusia dimana individu dan kelompok dari satu negara berinteraksi secara resmi ataupun tidak resmi dengan individu atau kelompok dari negara lain. Hubungan Internasional tidak hanya melibatkan kontak fisik secara langsung, tetapi juga transaksi ekonomi, penggunaan kekuatan militer dan diplomasi, baik secara publik maupun pribadi. Studi Hubungan Internasional ditunjukkan oleh aktivitas-aktivitas yang beragam, seperti perang, bantuan kemanusiaan, perdagangan dan investasi internasional, pariwisata bahkan olimpiade (Lopez dan Stohl, 1989:3).

Pada tahun 1920-an sampai 1930-an, studi Hubungan Internasional berjalan menurut tiga jalur, yaitu:

1. Hubungan Internasional dipelajari melalui penelaahan kejadian-kejadian yang sedang jadi berita utama dan dari bahan itu dicoba dibuat semacam pola umum kejadian.
2. Hubungan Internasional dipelajari melalui studi tentang Organisasi Internasional.
3. Hubungan Internasional adalah model analisa yang menekankan Ekonomi Internasional (Mas'oed, 1990:15).

GURMIWA-44305006

Pada tahun 1960-an dan 1970-an, perkembangan studi Hubungan Internasional makin kompleks dengan masuknya aktor IGO dan INGO serta makin kuatnya peran negara-negara di luar Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam kancah Hubungan Internasional. Pada tahun 1980-an, pola Hubungan Internasional masih bersifat *state centric* (dalam arti masih *bipolar*), tetapi muncul kekuatan-kekuatan *sub groups* yang mengemuka. Studi Hubungan Internasional adalah interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan bangsa. Hubungan Internasional mengacu pada segala aspek bentuk interaksi.

Kemudian pada tahun 1990-an, runtuhnya Uni Soviet sebagai negara komunis utama telah memunculkan corak perkembangan ilmu Hubungan Internasional yang khas. Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri semangat sistem internasional *bipolar* dan berubah pada *multipolar* atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia ini (Perwita dan Yani, 2005:2-5).

Pasca Perang Dingin yang di tandai dengan berakhirnya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mempengaruhi isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih fokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) kepada isu-isu *low politics* (misalnya HAM, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme yang dianggap sudah sama pentingya dengan isu *high politics* (kegley & Wittkopf, 1997 : 6).

GURMIWA-44305006

Pada awal perkembangannnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ilmu Hubungan Internasional adalah:

> "Bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*). Jadi, ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olahraga) atau pertukaran budaya (*cultural exchange*)" (Shcwarzenberger, 1964:8).

Sementara itu, terdapat sarjana Hubungan Internasional yang justru memperkecil ruang lingkup ilmu Hubungan Internasional, yaitu:

> "Ilmu Hubungan Internasional merupakan subjek akademis dalam memperhatikan hubungan politik antarnegara, dimana selain negara ada juga pelaku internasional, transnasional atau supranasional lainnya seperti organisasi nasional" (Hoffman, 1960:6).

Pendapat lain mengatakan bahwa ilmu Hubungan Internasional adalah:

> "Studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi" (Clelland, 1986:27).

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lain. Secara umum pengertian Hubungan Internasional adalah hubungan yang dilakukan antar negara yaitu unit politik yang didefinisikan menurut territorial, populasi dan otonomi daerah yang secara efektif mengontrol wilayah dan penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnis (A. Columbis dan Wolfe, 1990:22). Hubungan Internasional mencakup segala bentuk hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan cara berpikir manusia (Columbis dan Wolfe, 1990:33).

GURMIWA-4430506

Negara merupakan unit hubungan antar bangsa sekaligus sebagai aktor dalam masyarakat antar bangsa. Negara sebagai suatu organisasi diciptakan dan disiapkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai tindakan yang direncanakan (Columbis dan Wolfe, 1990:32). Sebagai aktor terpenting di dalam Hubungan Internasional, negara mempunyai tanggungjawab untuk mengupayakan jalan keluar atas segala permasalahan yang menimpa negaranya karena negara mempunyai peran utama didalam memenuhi kebutuhan rakyatnya dan meminimalisasi masalah yang ada dengan tujuan kesejahteraan rakyat.

Namun pada kenyataannya, negara sebagai aktor terpenting tidak selalu dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena keterbatasan sumber daya yang dimilikinya (*insuffiency*). Negara bukanlah satu-satunya aktor penting dalam Hubungan Internasional, melainkan ada aktor-aktor non-negara lainnya seperti Organisasi Internasional, *Multi National Corporations* (MNCs), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan interaksinyapun bukan antar negara saja.

Jika digambarkan maka sejarah perkembangan Hubungan Internasional adalah sebagai berikut :

GURMIWA-44305006

GURMIWA-44305006

Secara lebih spesifik, substansi Hubungan Internasional bisa dipilah ke dalam dua belas kelompok pertanyaan fundamental, yaitu:

1. Bangsa dan Dunia. Bagaimana dan dalam bentuk apa hubungan antara suatu bangsa dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya dilakukan?
2. Proses transnasional dan Interdependensi Internasional. Sejauh mana pemerintah dan rakyat dari suatu negara-bangsa bisa menentukan masa depannya sendiri? Berapa besar kemungkinannya untuk besikap independen dari bangsa lain?
3. Perang dan Damai. Apa yang menentukan terjadinya perang dan perdamaian diantara bangsa-bangsa?
4. Kekuatan dan Kelemahan. Bagaimana sifat kekuatan (power) dan kelemahan suatu pemerintah atau suatu bangsa dalam politik internasional?
5. Politik Internasional dan Masyarakat Internasional. Apa yang bersifat politik dalam Hubungan Internasional dan apa yang tidak? Bagaimana hubungan antara Politik Internasional dengan kehidupan masyarakat bangsa-bangsa?
6. Kependudukan versus Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Apakah jumlah penduduk dunia tumbuh lebih cepat daripada penyediaan bahan makanan, energi dan sumber daya alam lainnya, dan lebih cepat

GURMIWA-44305006

daripada daya dukung lingkungan, dalam arti udara dan air yang bersih serta lingkungan alam tanpa polusi?

7. Kemakmuran dan kemiskinan. Berapa besar ketimpangan distribusi kekayaan dan penghasilan diantara bangsa-bangsa di dunia?
8. Kebebasan dan Penindasan. Seberapa jauh kepedulian bangsa-bangsa tentang kebebasan mereka dari bangsa atau negara lain dan berapa jauh mereka mempedulikan kebebasan di dalam bangsa atau negara mereka sendiri?
9. Persepsi dan Ilusi. Bagaimana para pemimpin dan warga suatu negara memandang bangsa mereka sendiri dan bangsa lain serta perilaku mereka? Berapa kadar kenyataan atau khayalan dalam persepsi ini? Kapan persepsi itu bersifat realistik atau ilusi?
10. Aktivitas dan Apati. Lapisan dan kelompok mana dalam masyarakat yang berminat aktif terhadap politik?
11. Revolusi dan Stabilitas. Dalam kondisi apa kemungkinan suatu pemerintah dapat digulingkan?
12. Identitas dan Transformasi. Bagaimana individu, kelompok dan bangsa mempertahankan identitas mereka? Unsur-unsur apa yang membentuk identitas itu? (Mas'oed, 1990:29-32).

GURMIWA-4430506

2.2 Organisasi Internasional

Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar-bangsa untuk adanya alat untuk melaksanakan kerjasama internasional kerjasama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antar-negara dan antar bangsa ke arah pencapaian tujuan yang sama dan perlu diusahakan secara bersama-sama.(Rudy, 2005 : 4).

Negara-negara yang berdaulat menyadari perlunya pengembangan cara atau metode kerjasama berkesinambungan yang lebih baik mengenai penaggulangan berbagai masalah. Maka dari itu negara-negara tersebut membentuk organisasi internasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. (Kartasasmita, 1987 : 39)

2.2.1 Definisi Organisasi Internasional

Upaya mendefinisikan organisasi internasional harus melihat pada tujuan yang hendak dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan suatu negara dengan aktor non-negara (Coulombis & Wolfe, 1986: 276). Dalam melaksanakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut diatas, diperlukan juga suatu wadah-wadah guna menampung berbagai aspirasi dari negara-negara dalam dunia internasional. Wadah itu dinamakan organisasi internasional, yang menurut Quincy dalam kartasasmita adalah :

> "*International Organization is the art of creating and administering general and regional societies composed of independent states to facilitate cooperation in realising common purposes and objectives"* (Kartasasmita, 1977 :37)

GURMIWA-44305006

Organisasi Internasional secara sederhana dapat didefenisiskan sebagai pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal-balik yang diejahwantahakan melalui pertmuan-pertemuan serta kegiatan-kegitan staf secara berkala (Rudy, 2002: 93). Organisasi Internasional juga diartikan sebagai pola kerjasama yang melintas batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepekati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy,2002: 94). Secara sederhanan Organisasi Internasional terdiri dari unsur-unsur berikut dibawah ini :

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintas batas negara
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama
3. Baik antarpemerintah atau non-pemerintahan
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap (Rudy, 2002: 94)

Organisasi Internasional menurut Bowwet D.W merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebenyakan merupakan perjanjian multilateral dari pada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya (Bowwet, 1995: 3). Starke dalam buku

GURMIWA-4430506

"*Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*" yang ditulis oleh Syahmin A.K, mendefinisikan Organisasi Internasional sebagai alat perlengkapan negara moderen yang diatur oleh hukum konstitusi internasional (Syahmin,1986:4). Lain halnya dengan Schermers dalam bukunya "*International Institutional Law*" menyatakan bahwa Organisasi Internasional digunakan adalah untuk semua bentuk organisasi internasional yang belum sempurna, sifatnya diatas level negara yang diselenggarakan oleh organisasi internasional (Schermers, 1990: 5).

Organisasi Internasional adalah suatu proses yang juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul (Suryokusumo, 1990: 10). Dalam buku "*Segi - Segi Hukum Organisasi Internasional*" J.Pareire.Mandalangi menyebutkan bahwa Organisasi Internasional mempunyai arti ganda, dalam arti luas dan arti sempit. Organisasi internasional dalam arti luas menunjuk pada setiap organisasi yang melintas batas negara baik yang bersifat publik maupun privat sendangkan organisasi internasional dalam arti sempit hanya menunjuk pada setiap organisasi yang bersifat publik (Mandalangi, 1986: 1). Menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr' dalam bukunya "*Organizing For Peace : Internasional Organization In World Affair*" memberikan definisi secara sederhana tentang organisasi internasional sebagai pengaturan bentuk kerjasama internasional yang

GURMIWA-4430506

melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal-balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala (Rudy,1993:2). Dalam buku "*Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional*" J.Pareire.Mandalangi mengutip pendapat NA Maryan Green yang menyebutkan bahwa organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan sebuah perjanjian dengan tiga atau lebih negara-negara yang menjadi peserta (Mandalangi, 1986: 4). Dalam bukunya "*Hukum Organisasi Internasional*" Boer Mauna mendefenisikan Organisasi Internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri (Syamin, 1986: 5).

T.Sugeng Istanto dalam bukunya "*Hukum Internasional*" menjelaskan yang dimaksudkan dengan Organisasi Internasional dalam pengertian luas adalah bentuk kerjasama antar pihak-pihak yang bersifat internasional itu dapat berupa orang-perorang, badan-badan bukan negara yang berada di berbagai negara atau pemerintahan negara. Adapun yang dimaksud dengan tujuan internasional ialah tujuan bersama yang menyangkut kepentingan berbagai nagara (Istanto,1994:123).

Menurut Cliver Archer dalam Perwita dan Yani, Organisasi Internasional berasal dari dua kata yaitu Organisasi dan Internasional. Kata Internasional diartikan dalam beberapa makna :

GURMIWA-44305006

- *Intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antarwakil resmi dari negara-negara yang berdaulat.
- Aktivitas antar individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan transnasional.
- Hubungan antara suatu cabang pemerintahan disuatu negara (seperti: departeman pertahanan) dengan suatu cabang pemerintahan di suatu negara lain (seperti: badan pertahanan atau badan intelejen) dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut *transgovernmental*. Ketiga hubungan ini termasuk dalam hubungan internasional (Perwita dan Yani, 2005: 92)

Organisasi Internasional adalah sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Archer, 1983: 35). Organisasi Internasional dalam pengertian Michael Hass dalam Rosenau memiliki dua pengertian yaitu Sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat, dan waktu pertemuan, dan organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian yang menjadi satu kesatuan yang utuh (Rosenau, 1969: 31).

2.2.2 Klasifikasi Organisasi Internasional

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Organisasi internasional bila dilihat dari

GURMIWA-44305006

keanggotaannya dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan (*extend of membership*). Bila menyangkut tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara sebagai anggota atau *International Govermental Organizations* (IGOs), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau *International Non-Govermental Organizations* (INGOs). Dalam hal jangkauan keanggotaan, organisasi internasional ada yang keanggotaannya terbatas dalam wilayah tertentu saja, dan satu jenis lagi dimana keanggotaannya mencakup seluruh wilayah di dunia.

Karakteristik umum yang terdapat dalam kedua jenis lembaga internasional tersebut meliputi :

1. Organisasi permanen untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu
2. Keanggotaannya bersifat sukarela
3. Instrumen dasar yang menyatakan tujuan struktur, dan metode pelaksanaannya
4. Badan konstultatif yang represantitatif
5. Dan sekertariat permanen yang menjalankan fungsi administratif, penelitian, dan informasi. (Bennet, 1997 : 3)

Teuku May Rudy dalam bukunya "*Hukum Internasional*" mengemukakan dari segi ruang lingkupnya, fungsinya, kewenangannya, dan sebagainya ada beberapa macam penggolongan organisasi internasional. Suatu organisasi

GURMIWA-44305006

internasional dapat sekaligus menyandang lebih dari satu macam penggolongan, bergantung pada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya. Secara terperinci pengolongan organisasi internasional ada bermacam-macam menurut segi tinjauan berdasarkan 8 hal yaitu sebagai berikut :

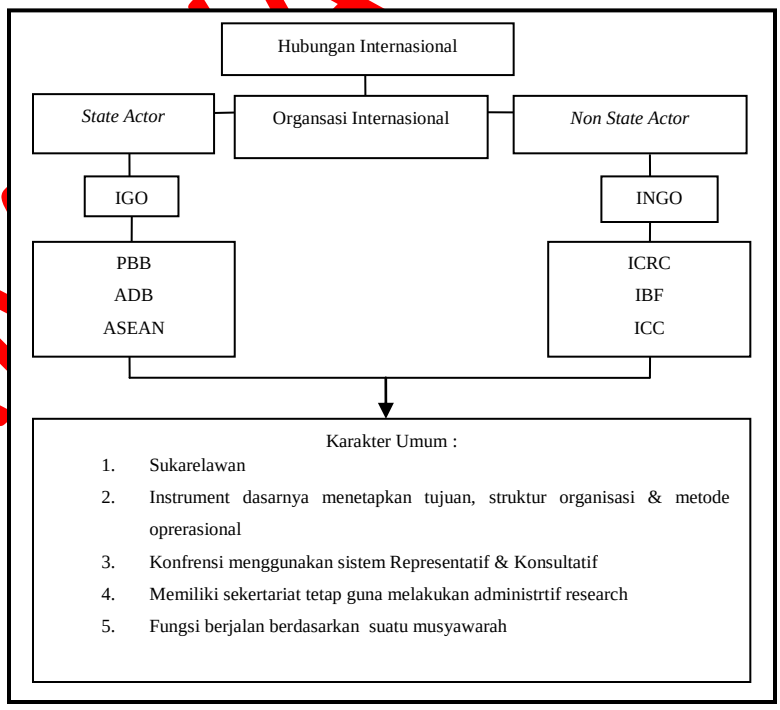
1. Kegiatan administrasi organisasi internasional antarpemerintah (*inter-governmental organization/IGO)* dan organisasi internasional non-pemerintahan (*non-governmental organization / NGO)*
2. Ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan ; organisasi internasional gobal dan organisasi internasional regional
3. Bidang kegiatan (oprasional) organisasi, seperti bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri), bidang bea cukai, perdagangan internasional dan lain-lain
4. Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi: organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
5. Ruang lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan : global-umum, global-khusus, regional-umum dan regional-khusus.
6. Menurut taraf kewenangan (kekuasaan): organisasi supranasional dan orgaisasi kerjasama.
7. Bentuk dan pola kerjasama: kerjasama pertahanan keamanan dan kerjasama fungsional.

GURMIWA-4430506

8. Fungsi organisasi : organisasi politik (*political organization*), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional, organisasi administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegitan teknis secara administratif; dan organisasi peradilan yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonomi, sosial dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketantuan internasional dan perjanjian internasional) (Suherman : 60 : 2003).

Klasifikasi dan karakter umum organisasi internasional dalam ruang lingkup hubungan internasional dapat lebih jelasnya kita lihat pada Gambar 2.2 di bawah ini :

Gambar 2.2
Klasifikasi dan Karakter Umum Organisasi Internasional



(Sumber : Bennet, 1997 : 3)

GURA-A-4430506

Konsep dan praktek dasar yang melandasi IGOs modern melibatkan diplomasi, perjanjian, konferensi, aturan-aturan dan hukum perang, pengaturan penggunaan kekuatan, penyelesaian sengketa secara damai, pembangunan hukum internasional, kerjasama ekonomi internasional, kerjasama sosial internasional, hubungan budaya, perjalanan lintas negara, komunikasi global, gerakan perdamaian, pembentukan federasi dan liga, administrasi internasional, keamanan kolektif, dan gerakan pemerintahan dunia (Bennet, 1995: 9).

IGOs dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuannya, yaitu:

1. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum

   Organisasi ini memiliki ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, sosial-ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, pertukaran kebudayaan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah PBB.

2. Organisasi yang keanggotaannya umum tetapi tujuannya terbatas

   Organisasi ini dikenal juga sebagai organisasi fungsional karena diabdikan untuk satu fungsi spesifik. Contohnya *International Labour Organization* (ILO), *World Health Organization* (WHO), *United Nations on AIDS* (UNAIDS), dan lain sebagainya.

3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas tetapi tujuannya umum

   Organisasi seperti ini biasanya adalah organisasi yang bersifat regional yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik dan sosial-ekonominya berskala luas. Contohnya adalah Uni Eropa, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), Uni Afrika, dan lain sebagainya.

GURMIWA-44305006

4. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya terbatas

   Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial-ekonomi, contohnya adalah Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin (LAFTA), serta organisasi militer/pertahanan, contohnya adalah *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan Pakta Warsawa (Columbis & Wolfe, 1999: 281).

Klasifikasi organisasi internasional menurut tujuan dan aktivitasnya berkisar dari yang bersifat umum hingga yang khusus dan terbagi menurut orientasinya, yaitu; menuju pada hubungan kerjasama para anggotannya, menurunkan tingkat konflik atau menghasilkan konfrontasi antaranggota atau yang bukan anggota. Klasifikasi yang terakhir adalah berdasarkan struktur organisasi internasional. Dengan memperhatikan strukturnya, maka dapat dilihat bagaimana suatu institusi membedakan antara satu anggota dengan anggota lainnya, sehingga, dengan demikian, dapat dilihat bagaimana suatu organisasi internasional dalam memperlakukan anggotannya. Selain itu, struktur juga dapat melihat tingkat kemandirian institusi dari anggotannya yang berupa pemerintahan dan melihat keseimbangan antara elemen pemerintahan dan yang bukan pemerintahan (Archer, 1983: 66-67).

2.2.3 Fungsi Organisasi Internasional

Dalam mencapai tujuannya, organisasi internasional harus menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga, tujuan tersebut tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan. Selain untuk mencapai tujuannya, organisasi internasional juga harus

GURMIWA-4430506

memiliki fungsi terhadap anggota-anggotannya. Leroy Bennet dalam bukunya yang berjudul *International Organization, Principle and Issue*, mengemukakan bahwa:

> "Suatu organisasi internasional harus menjadi sarana kerjasama antarnegara, yang mana kerjasama tersebut mampu memberikan manfaat bagi semua anggotannya. Selain itu, organisasi internasional harus mampu menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah, agar wilayah akomodasi dapat dieksplorasi dengan mudah, terutama ketika muncul suatu masalah" (Bennet, 1995: 9).

Secara umum, fungsi organisasi internasional dapat dibagi ke dalam sembilan fungsi, yaitu:

1. Artikulasi dan agregasi

   Organisasi internasional berfungsi sebagai instrument bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya, serta dapat mengartikulasikan kepentingannya sendiri. Organisasi internasional menjadi salah satu bentuk kontak institusionalisme antara partisipan aktif dalam sistem internasional, yaitu sebagai forum diskusi dan negosiasi.

2. Norma

   Organisasi internasional sebagai aktor, forum dan instrument yang memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari sistem politik internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non-diskriminasi.

3. Rekrutmen

GURMIWA-4430506

Organisasi internasional menunjang fungsi penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.

4. Sosialisasi

   Sosialisasi berarti upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem. Proses sosialisasi pada level internasional berlangsung pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam sejumlah negara dan di antaranya negara-negara yang bertindak pada lingkungan internasional atau di antara wakil mereka di dalam organisasi. Dengan demikian, organisasi internasional memberikan kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan nilai kerjasama.

5. Pembuat peraturan

   Sistem internasional tidak mempunyai pemerintahan dunia, oleh karena itu, pembuatan keputusan internasional biasanya didasarkan pada praktek masa lalu, perjanjian *ad hoc*, atau oleh organisasi internasional.

6. Pelaksanaan peraturan

   Pelaksanaan keputusan organisasi internasional hampir pasti diserahkan kepada kedaulatan negara. Di dalam prakteknya, fungsi aplikasi aturan oleh organisasi internasional seringkali lebih terbatas

GURMIWA-44305006

pada pengawasan pelaksanaannya, karena aplikasi sesungguhnya ada di tangan negara anggota.

7. Pengesahan peraturan

   Organisasi internasional bertugas untuk mengesahkan aturan-aturan dalam sistem internasional. Fungsi ajudikasi dilaksanakan oleh lembaga kehakiman, namun fungsi ini tidak dilengkapi dengan lembaga yang memadai dan tidak dibekali oleh sifat yang memaksa sehingga hanya terlihat jelas bila ada pihak-pihak negara yang bertikai.

8. Informasi

   Organisasi internasional melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi.

9. Operasional

   Organisasi internasional menjalankan sejumlah fungsi operasional di banyak hal yang sama halnya seperti dalam pemerintahan. Fungsi pelaksanaan yang dilakukan organisasi internasional terlihat pada apa yang dilakukan oleh UNHCR yang membantu pengungsi, *World Bank* yang menyediakan dana, UNICEF yang melakukan perlindungan terhadap anak-anak, dan lain sebagainya. (Archer, 1983 : 152-169)

2.2.4 Tujuan Organisasi Internasional

Tujuan dari organisasi internasional tentu dapat kita lihat dari piagam (*charter*) atau statua yang membentuk dan mendirikannya. Tujuan dari setiap

GURMIWA-44305006

organisasi internasional teresbut dapat dilihat dari anggaran dasar organisasi internasional tersebut. (Rudy, 2005 : 31). Secara umum tujuan organisasi internasional menurut Michael Haas dalam Rossenau adalah :

> "Koordinasi kegiatan-kegiatan bersama di antara anggota-anggota organisasi internasional yang bersangkutan. Koordinasi tersebut mencakup pembagian tugas yang jelas, dan bisa melalui jalur formal dan jalur informal" (Rossenau, 1969 : 131-132).

Sedangkan menurut menurut Werner J. & Robert S. Jordan dalam Rudy, tujuan organisasi internasional (baik IGOs maupun INGOs dapat dibagi atas tiga kategori, yaitu :

1. Untuk memelihara kepentingan anggota-anggotanya di arena internasional (global dan regional).
2. Untuk mengimbangi organisasi internasional lainnya.
3. Untuk mengubah, memodifikasi, menyelaraskan kepentingan nasional dari negara-negara anggotanya. (Rudy, 2005 : 31)

Tujuan organisasi internasional menurut ulasan Coulombis dan Wolfe adalah untuk :

1. Regulasi hubungan antar negara terutama melalui cara-cara penyelesaian sengketa secara damai.
2. Mencegah perang, meminimalkan dan mengendalikan konflik internasional (*conflict management*).
3. Memajukan dan menignkatkan kegiatan kerjasama ekonomi dan sosial untuk pembangunan dan kesejahteraan penduduknya.

GURMIWA-44305006

4. *Collective security* atau *collective defense* (aliansi) sekelompok negara untuk pembangunan dan kesejahteraan penduduknya. (Coulumbis & Wolfe, 1999 : 278-280)

2.2.5 Peranan organisasi Internasional

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan. Sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotannya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.
2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah (Bennet, 1995: 3).

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang

GURMIWA-44305006

telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya.

2.2.6 Pendekatan Struktural Fungsional

Pendekatan Fungsional sering digunakan untuk melihat fenomena internasional yang melibatkan organisasi internasional secara utuh, kemudian memenculkan analisis tentang organisasi internasional yang berkaitan erat dengan lingkungan dan teknik administrasinya.

Pendekatan struktural-fungsional mengacu pada pemahaman bahwa fungsi merujuk pada "bagaimana hal itu dilakukan". Struktur berarti pola dari aksi dan operasi institusional. Tujuan utama fungsi adalah mempertahankan unit yang lebih besar atau yang lebih penting tetap berada didalam, dimana struktur itu sangat melekat.

Pendekatan fungsional merupakan suatu rangkaian perluasan bagi pendekatan struktural fungsional yang dikemukakan oleh David Easton, dalam kerangka studi Hubungan Internasional, serta mempunyai makna umum sebagai studi tentang fungsi-fungsi yang dijalankan dalam suatu organisasi internasional serta melihat struktur mana yang dijalankan fungsi-fungsi tadi dan dalam kondisi yang bagaimana. Jadi yang ditekankan disini adalah fungsi yang dijalankan dalam suatu lingkungan internasional.

Bentuk analisis pendekatan ini juga dapat menyediakan pengertian mengenai bagaimana fungsi birokrasi institusional ini dalam konteks politik internasional, dan

GURMIWA-44305006

sejauh mana harapan negara-negara pendiri organisasi internasional tercapai. Analisis ini harus memperhitungkan bagaimana permintaan berbagai konstituensi organisasi internasional dijalankan, apa hasil akhir proses fungsi itu, bagaimana umpan balik diawasi oleh organisasi internasional untuk menentukan sebaik apa organisasi tersebut memenuhi tujuannya dan sejauhmana pemenuhan kepentingan negara anggota tetap terjaga dan diutamakan.

Perkembangan yang signifikan dalam litelatur Hubungan Internasional setelah Perang Dunia II adalah pergeseran dari pandangan yang *state-centric* ke pandangan yang mengakui keberadaan aktor internasional lainnya, selain negara yang berdaulat. Aktor internasional tersebut dapat berupa IGO maupun INGO. David Mitrany adalah Prominen pendekatan fungsional dengan karya monumentalnya *A Working Peace System.* Mintary melihat bahwa terjadi perubahan yang signifikan didunia internasional di abad ke-19 dimana entitas yang ada memiliki keterhubungan yang sangat kuat. Perubahan tersebut terlihat dengan adanya pergerakan internasional dan dibuatnya perjanjian-perjanjian oleh sektor publik maupun privat (Archer, 1983: 83)

Pendekatan fungsional tidak hanya memfokuskan pada IGO, tetapi memperbolehkan hadirnya agen-agen tertentu dalam bentuk INGO. Fungsionalis menganggap warga dunia berada dalam satu kesatuan fungsional sehingga tercipta komunitas dunia yang saling terhubung antara kelompok-kelompok dengan masyarakat. Starategi fungsionalisme didasarkan pada asumsi bahwa negara bukan

GURMIWA-4430506

merupakan aktor uniter, melaikan suatu organisasi dari departemen-departemen dan individu-individu yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Peranan organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan yang lebih luas selain dari pada pemecah masalah. Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas-aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.
2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.
3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah (Bennet, 1995: 8).

2.3 Paradigma Pluralis (*Pluralism*)

Dari uraian pada sub-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hubungan internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lainya. Namun pada kenyataanya hubungan internasional tidak terbatas hanya pada hubungan antar negara saja, tetapi ada pula aktor-aktor selain negara, hal ini dikemukakan oleh paradigma pluralis.

Pemikiran atau pandangan tradisional yang menjadi dasar dalam Perjanjian Westphalia dianggap sudah tidak tepat lagi untuk memahami dunia masa kini. Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye dalam buku "*Ilmu Hubungan Internasional*: *Disiplin dan Metodologi"* karya Mohtar Mas'oed mengemukakan bahwa:

GURMIWA-44305006

> "Pandangan tradisional, yang terutama memandang bahwa negara-negara merupakan aktor yang berdaulat, berperilaku bebas dan memiliki kekuatan militer, dianggap bisa menuntun kearah pembuatan kebijaksanaan yang salah dan tidak semestinya dilakukan, yang bahkan bisa membahayakan umat manusia" (Mas'oed, 1994: 230).

Paradigma merupakan pijakan dasar untuk menjelaskan fenomena-fenomena, masalah-masalah Hubungan Internasional atau politik tertentu melalui sistem kriteria, standar-standar, prosedur-prosedur dan seleksi fakta permasalahan yang relevan. (Perwita & Yani,2005: 24-25). Pengertian paradigma pluralis adalah sebagai berikut:

> "Merupakan salah satu perspektif yang berkembang pesat. Kaum Pluralis memandang Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja, tetapi juga merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal". (Perwita &Yani,2005 : 24-25)

Paradigma pluralis memberikan 4 asumsi, yaitu:

1. Aktor non-negara memiliki peranan penting dalam Politik Internasional seperti Organisasi Internasional, baik pemerintah maupun non-pemerintah, *Multi National Corporations* (MNCs), kelompok atau individu.
2. Negara bukanlah aktor tunggal, karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara dan menjadikan negara bukan satu-satunya aktor.
3. Negara bukanlah aktor rasional. Dalam kenyataannya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisi dan kompromi antar aktor di dalam negara.

GURMIWA-4430506

4. Masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaksa pada *power* atau *national security*, tetapi meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi dan lain-lain. (Viotti, Kauppi,1990 :1992-1993)

Bagi kaum Pluralis, interdependensi memiliki implikasi yang baik terhadap aktor-aktor Hubungan Internasional. Mengelola hubungan interdependen meliputi pembuatan seperangkat aturan, prosedur dan institusi yang terasosiasi atau Organisasi Internasional untuk mengatur interaksi dalam area-area isu. Negara tetap memiliki tempat tersendiri sebagai aktor dimana negara merupakan kelompok yang mewakili dan meliputi anggota-anggota dengan refleksi yang berbeda-beda dan perlu berhubungan dengan pihak lain demi pencapaian kepentingan nasionalnya. Negara merupakan suatu unit politik yang didefinisikan menurut teritorial, populasi dan otonomi pemerintah yang secara efektif mengontrol wilayah dan penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnis. (Viotti, Kauppi,1990 :1992-1993).

2.4 Bantuan Luar Negeri

Secara umum menurut Jack C. Plano dan Ray Olton dalam bukunya yang berjudul *The International Relation Dictionary*, menyebutkan bahwa definisi dari bantuan luar negeri adalah :

> "Bantuan ekonomi, sosial, atau militer yang diberikan kepada suatu negara oleh pemerintah negara lainya atau lembaga internasional yang bertujuan untuk mendukung persekutuan, membangun kembali perekonomian yang rusak karena perang, memajukan pembangunan ekonomi, meraih dukungan ideologis, memperoleh bahan baku strategis, serta menyelamatkan kehidupan bangsa dari bahaya keruntuhan ekonomi atau bencana alam". (Plano & Olton, 1982 : 110)

GURMIWA-44305006

Sedangkan menurut Michael Todaro dalam buku Yanuar Ikbar, definisi dari bantuan luar negeri adalah :

> "Bantuan yang meliputi semua pinjaman konsesional (suku bunga dan jangka pembayaran kembali modal yang dipinjam secara lunak dibandingkan syarat-syarat yang berlaku bagi pinjaman komersial) dan bantuan pemerintah dalam bentuk uang atau barang, mengalihkan sumber-sumber dari negara kaya ke negara Dunia Ketiga dengan tujuan untuk pembangunan atau pemerataan pendapatan. Bantuan luar negeri dapat dipilah menjadi bantuan berupa pemberian (hibah), bantuan pinjaman dan bantuan berupa penanaman modal (investasi) asing" (Ikbar, 1995:207).

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri. Secara umum bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari satu pemrintah ke pemerintah lain yang dapat berbentuk barang atau dana (perwita dan yani,2005:82).

Pearson Frederick dan Payasilian mengajukan empat teori mengenai bantuan luar negeri, yaitu:

- Aliran realis menyatakan bahwa tujuan utama dari bantuan luar negeri adalah bukan untuk menunjukkan idealisme abstrak aspirasi kemanusiaan tetapi untuk proyeksi *power* nasional. Bantuan luar negeri merupakan komponen penting bagi keamanan internasional.
- Teori ketergantungan (dependensia) menyatakan bahwa bantuan luar negeri digunakan oleh rakyat kaya unutk mempengaruhi hubungan domestik dan luar negeri negara penerima bantuan, merangkul elit politik lokal di negara penerima bantuan untuk tujuan komersil dan keamanan

GURMIWA-4430506

nasional. Kemudian, melalui jaringan internasional, keuangan internasional dan strukutur produksi, bantuan luar negeri ditujukan untuk mengeksploitasi sumber daya alam negara penerima bantuan. Sehingga, para penganut teori dependensia menganggap bahwa bantuan luar negeri dapat digunakan sebagai sebuah instrumen untuk perlindungan dan ekspansi negara kaya ke negara miskin, sebuah sistem untuk mengekalkan ketergantungan.

- Aliran moralis/idealis menyatakan bahwa bantuan luar negeri secara esensial merupakan gerakan kemanusiaan yang menunjukan nilai-nilai kemanusiaan internasional. Menurut aliran idealis, negara yang lebih kaya memiliki tanggungjawab moral untuk mempererat kerjasama Utara Selatan yang lebih besar dan merespon kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial di Selatan. Maka dari pada itu, moralis berpendapat bahwa bantuan luar negeri mendorong dukungan yang saling menguntungkan sejalan dengan pembangunan ekonomi dan hak asasi manusia, hukum dan keterlibatan internasional.
- Teori *bureaucratic incrementalist* meyatakan bahwa bantuan luar negeri sebagai kebijakan publik, produk dan politik domestik yang melibatkan opini publik, kelompok kepentingan, dan intitusi pemerintah yang secara langsung terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang mempromosikan kepentingan nasional melalui agenda politik. Teori ini

GURMIWA-4430506

juga menyatakan bahwa tujuan yang dikejar negara donor dalam lingkup kepentingan ekonomi politik internasional, antara lain kombinasi tujuan kemanusiaan geopolitik, ideologi, kepentingan komersil, masalah lingkungan dan berbagai faktor dalam politik domestik. (1999: 380-381)

Bantuan luar negeri umumnya tidak ditujukan untuk kepentingan politik jangka pendek melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka panjang. Dalam jangka jangka panjang bantuan luar negeri dimaksudkan untuk membantu menjamin beberapa tujuan politik negara donor yang tidak dapat dicapai hanya melalui diplomasi, propaganda atau kebijakan publik. (Hoslti, 1992 : 251). Paling tidak ada dua syarat aliran modal dari luar negeri merupakan bantuan luar negeri, yaitu :

- Aliran modal dari luar negeri tersebut bukan didorong untuk mencari keuntungan,
- Aliran modal dari luar negeri atau dana tersebut diberikan kepada negara penerima atau dipinjamkan dengan syarat yang lebih ringan daripada yang berlaku dalam pasar internasional. (Sadono, 1985 : 371)

Karena itu, aliran modal dari luar negeri yang tergolong sebagai bantuan luar negeri dapat berupa pemberian atau dana hibah (*grant*) dan pinjaman luar negeri (*loan*) yang diberikan oleh negara negara donor atau badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman luar negeri, seperti Bank Dunia (*World*

GURMIWA-44305006

Bank), Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*), Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*), dan sebagainya (Sadono, 1985 : 371).

Hoslti dalam Perwita & Yani membagi program bantuan luar negeri ke dalam empat jenis, yaitu berupa bantuan militer, bantuan teknik dana hibah dan komoditi impor, dan pinjaman pembangunan. (Perwita & Yani, 2005 : 83). Definisi dari bentuk bantuan luar negeri tersebut adalah :

1. Bantuan Militer

   Bantuan yang diberikan negara donor untuk membiayai bidang militer secara fisik maupun dalam bentuk non-fisik, seperti pemberian bantuan senjata, maupun pelatihan-pelatihan militer guna untuk meningkatkan kapabilitas militer di negara yang membutuhkan.

2. Bantuan Teknik

   Bantuan yang diberikan kepada negara penerima donor untuk proyek-proyek tertentu di negara penerima, yang berupa bantuan tenaga ahli (*expert*), pelatihan, dan peralatan.

3. Dana hibah (*grant)*

   Bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara donor untuk negara yang membutuhkan dalam bentuk dana yang sifatnya non-moneter, dalam artian bahwa jenis dana ini tidak perlu dikembalikan oleh negara penerima donor. Biasanya dana hibah ini diberikan langsung oleh negara donor kepada negara penerima maupun secara tidak

GURMIWA-4430506

langsung, yaitu negara donor menunjuk aktor lainnya untuk mengelola dana hibah ini.

4. Pinjaman pembangunan.

   Bantuan pinjaman pembangunan ini digolongkan menjadi dua jenis, yaitu :

   - Pinjaman program, pinjaman ini adalah pinjaman yang berupa devisa yang diperlukan untuk menutupi kekosongan neraca pembayaran, yaitu untuk mengimpor barang-barang yang diperlukan oleh rakyat. Contohnya adalah pinjaman pangan dan komoditi.
   - Pinjaman proyek, pinjaman ini adalah pinjaman yang diberikan dalam bentuk fasilitas pembiayaan berupa valuta asing, untuk membiayai berbagai kegiatan proyek pembangunan, baik dalam rangka rehabilitasi, pengadaan barang peralatan dan jasa, dan perluasan atau perluasan proyek baru.

2.4.1 Motif Bantuan Luar Negeri

Program bantuan luar negeri ini biasanya saling menguntungkan kedua belah pihak. Pihak penerima memperoleh pinjaman dana, perlengkapan, pengetahuan yang diharapkan mampu mengikuti dinamika ekonomi modern, stabilitas politik dan keamanan militer. Sedangkan pihak pemberi atau donor tanpa memperhitungkan jenis-jenis persyaratanya selalu mengharapkan keuntungan politik dan ekonomi baik

GURMWA-44305006

langsung maupun jangka panjang, yang tidak bisa diperoleh sepenuhnya melalui diplomasi, propaganda atau kebijakan militer. (Holsti, 1992 : 321-328).

Hal itu dikarenakan sebagai instrumen kebijakan luar negeri, bantuan luar negeri merupakan tindakan ekonomi yang memiliki sifat dan efektifitas berbeda dibandingkan diplomasi dan propaganda. Diplomasi dan propaganda mengandalkan personel untuk memanfaatkan situasi dan tatanan internasional yang ada. Sedangkan bantuan luar negeri lebih mengandalkan kapabilitas dalam bentuk modal, sumber daya serta kemampuan manajerial. Teknik pemberian bantuan luar negeri dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Dengan kata lain, pemberian bantuan luar negeri dapat dilakukan antar pemerintah (*goverment to goverment*) atau melalui lembaga keuangan internasional. Namun dikaji dari segi urgensinya bantuan luar negeri secara bilateral memiliki ikatan poilitik yang lebih kuat daripada bantuan luar negeri secara multilateral dan juga secara khusus lebih sensitif terhadap kondisi politik domestik. (Toma & Gorman, 1991: 319).

Sifat urgensi di atas tidak terlepas juga dari motivasi para pemberi bantuan luar negeri (negara donor). Terdapat empat kategori motivasi negara donor, yaitu :

- Pertama, motif kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi.
- Kedua, motif politik yang memusatkan tujuan untuk meningkatkan *image* dari negara negara pendonor. Peraihan pujian menjadi tujuan dari

GURMIWA-4430506

pemberian bantuan luar negeri baik dari politik domestik dan hubungan luar negeri donor.

- Ketiga, motif keamanan nasional, yang medasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motif keamanan memiliki sisi ekonomi.
- Keempat, motif yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor. (Rix, 1993 : 18-19).

Dari keempat motivasi di atas terlihat bahwa pada hakikatnya bantuan luar negeri merupakan bantuan yang diberikan kepada suatu negara oleh pemerintah negara lainnya atau lembaga internasional berupa bantuan ekonomi, sosial dan militer yang diberikan secara bilateral atau multilateral oleh badan internasional. Tujuan pemberian bantuan luar negeri antara lain mendukung peresekutuan, membangun ekonomi, meraih dukungan ideologis, memperoleh bahan baku strategis, kemanusiaan, serta menyelamatkan kehidupan bangsa dari bahaya keruntuhan ekonomi ataupun bencana alam. (Perwita & Yani, 2005 : 84).

2.5 Konsep Rehabilitasi Infrastruktur Dalam Kajian Hubungan Internasional

Rehabilitasi infrastruktur di sutau negara sangat dibutuhkan untuk kelancaran arus ekonomi dan sosial, terutama di negara-negara pada masa kondisi setelah konflik (*post-conflict state*). Karena negara-negara yang baru mengalami konflik tersebut

GURMIWA-4430506

akan mengalami kerusakan infrastruktur yang parah, seperti kehancuran jalan-jalan raya, suber listrik, pelabuhan, sekolah, sistem pengairan, dll akibat dilewati kendaraan-kendaraan militer dan hancur akibat ledakan dan sebagainya. Maka dari pada itu proses rehabilitasi infrastruktur tersebut ditujkan guna mengembalikan fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan mengembalikan keadaan fisik pra kehancuran dari fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. (Grigg & Darell, 2000 : 61)

Rehabilitasi secara umum adalah proses usaha guna mengembalikan keadaaan seperti keadaan semula dimana secara fisik belum hancur dan secara non-fisik masih dapat berfungsi dengan baik. (http://www.diplomat21.com/AID1.htm, diakses pada tanggal 12 mei 2009). Rehabilitasi sangat dibutuhkan oleh sebuah negara, terutama di negara yang sangat membutuhkan, seperti negara yang baru melewati masa setelah konflik (Paska Konflik). Biasanya program rehabilitasi tersebut termasuk dalam program bantuan luar negeri dari negara atau institusi internasional lainnya kepada negara-negara yang membutuhkan baik secara bilateral maupun multilateral, bantuan rehabilitasi secara bilateral adalah bantuan rehabilitasi yang secara langsung diberikan oleh negara donor kepada negara penerima, sedangkan bantuan rehabilitasi secara multilateral adalah bantuan rehabilitasi yang dikelola oleh lembaga-lembaga internasional untuk diberikan kepada negara penerima. Salah satu program

GURMIWA-4430506

rehabilitasi yang paling umum dilakukan oleh negara donor adalah rehabilitasi infrastruktur. (www.laohamutuk.org/Bulletin/2001/Dec/lh2n8bh.pdf, dikases pada tanggal 12 mei 2009).

Menurut Grigg dalam bukunya yang berjudul *Infrastructure Engineering and Management Infrastructure Engineering and Management*, pengertian infrastruktur adalah :

> "Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi". (1988 : 43)

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg & Darell, 2000 : 61). Motef dan Parformak dalam bukunya yang berjudul *Critical Infrastructure and Key Assets* menjelaskan bahwa pengertian dari infrastruktur adalah :

> "Fasilitas-fasilitas dasar yang melayani kebutuhan-kebutuhan rkonomi dan sosial di suatu negara, seperti sistem trasnsportasi, sistem komunikasi, jaringan listrik dan air, serta intstitusi-institusi publik seperti sekolah, rumah sakit dan penjara" (2004 :1)

Kodatie juga menjelaskan ada syarat infrastruktur yang baik dimana dapat menunjang kondisi sosial dan ekonomi suatu negara. Syarat-syarat tersebut adalah dimana infrastruktur tersebut dapat memfasilitasi dengan baik berbagai aktifitas perekonomian dan sosial di suatu negara, seperti listrik yang cukup, jalan raya yang

GURMIWA-44305006

dapat memberikan akses yang baik dari daerah perkotaan sampai pelosok, dan dapat memberikan pelayanan yang baik yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu negara seperti akses terhadap air bersih yang cukup dan tersedianya sekolah-sekolah yang layak (Kodatie, 2003 : 81-82)

GURMIWA-44305006